

**RELASI AGAMA DAN POLITIK: PREFERENSI POLITIK PEMILIH  
MILLENNIAL DI PONOSAKAN BELANG, DALAM PILKADA  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

**Rohit Mahatir Manese**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Email: [rohit@iain-manado.ac.id](mailto:rohit@iain-manado.ac.id)

**Budi Nurhamidin**

Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu

Email: [budinurhamidin13@gmail.com](mailto:budinurhamidin13@gmail.com)

**Abstract**

This study explains the relationship between religion and politics in the contestation of democracy in Indonesia. In this case, the 2020 Regional Head Election in North Sulawesi, especially in the village of Ponosakan Belang. By using a qualitative-descriptive research method and reading using a sociological and psychological approach. This research found that in the 2020 Pilkada in North Sulawesi there was one candidate who was Muslim and this is a preference for millennial voters in Ponosakan Belang to choose that candidate. The reading uses sociological theory, the preference is to choose an Islamic leader because of the same beliefs and religions. Psychologically, the presence of millennial voter political preferences is due to the issue of using Islamic symbols. The author's thesis is that in an electoral democracy, the relationship between religion and state is difficult to separate, religion becomes an important consideration in politics.

**Keywords:** *Islam and Politics; Political Preference; Democracy: Pilkada North Sulawesi 2020*

**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan relasi antara agama dan politik dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sulawesi Utara khususnya di desa Ponosakan Belang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif serta pembacaan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Utara terdapat salah satu calon yang beragama Islam dan ini menjadi preferensi bagi pemilih millennial di Ponosakan Belang untuk memilih kandidat tersebut. Pembacaan menggunakan teori sosiologis, preferensi memilih pemimpin Islam karena keyakinan dan agama yang sama. Secara psikologis, hadirnya preferensi politik pemilih millennial disebabkan adanya isu yang menggunakan simbol-simbol Islam. Tesis penulis adalah dalam demokrasi electoral hubungan agama dan negara sulit dipisahkan, agama menjadi pertimbangan penting dalam politik.

**Kata Kunci:** *Islam dan Politik; Preferensi Politik; Demokrasi: Pilkada Sulut 2020*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu darinegara dunia yang memilih demokrasi sebagai tatanan politik kenegarannya. Relevansi memakai demokrasi karena kondisi fisik Indonesia sangat cocok dengan sistem yang lahir dari barat ini. Dalam penerapannya Indonesia telah mencoba demokrasisesuai dengan kebijakan dari rezim yang memimpin. Demokrasi yang terus berganti ini telah mengapdosasi dan menjalankan beberapa modelnya.<sup>1</sup>Pergantian demokrasi sebagai sebuah tatanan terdapat pada periode-periode tertentu. Pergantian pertama adalah demokrasi liberal, pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkannya maklumat pemerintah yang ditanda tangani langsung oleh bung Hatta selaku wakil presiden waktu itu. Pada sistem ini pemilu pertama kali terjadi yakni pada tahun 1955 dan terdapat 39 partai politik yang terdaftar dalam pemilu waktu itu.

Rezim yang masih dipimpin oleh Soekarno dan Hatta mengganti lagi demokrasi yang ada dengan demokrasi terpimpin. Hal ini kemudian banyak menimbulkan kontroversi terhadap Soekarno, karena beberapa elit politik waktu itu tidak sepekat dengan pergantian pejabat pada waktu itu. Muhammad Hatta salah satu tokoh yang tidak sepekat dengan pergantian sistem ini, karena baginya hanya akan membuat Soekarno menjadi pemimpin yang dictator. Sementara pada era selanjutnya demokrasi dinamakan dengan demokrasi Pancasila era ini dikenal dengan orde baru. Latar belakang dari perubahan ini karena dua sistem sebelumnya itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia dan tidak pernah berhasil menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Demokrasi yang dirubah ke demokrasi Pancasila bagi beberapa kalangan sangat kontroversial karena kebijakan ini hanya akan melanggengkan kekuasaan yang sewenang-wenang dari orde baru. Dalam konsep demokrasi Pancasila setiap rakyat Indonesia dalam kehidupannya harus berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam pancasila yaitu 5 ajaran atau norma yang ada dalam Pancasila.

Setelah orde baru runtuh, pada era reformasi keran demokrasi semakin terbuka. Indonesia yang dipimpin oleh horde baru tidak menggambarkan demokrasi yang sesungguhnya, rezim orde baru menjadi pemerintah yang otoriter, padahal syarat mutlak dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pada era reformasi demokrasi masih memakai platform demokrasi Pancasila, tetapi berbeda pada penerapannya dengan orde baru. tatanan politik Indonesia semakin terbuka pers semakin bebas dilindungi dengan undang-undang, kebebasan dalam berpendapat, berorganisi dan berkumpul. Ada empat ciri menandakan demokratisasi setelah orde baru runtuh: (1) Pemilihan lebih demokratis (2) Partai politik lebih mandiri (3) Adanya pengaturan hak asasi manusia, (4) lembaga demokrasi lebihberfungsi<sup>2</sup>, (5) Desentralisasi dengan adanya otonomi daerah. Hal yang menarik untuk dibahas pada era ini adalah demokrasi yang berfungsi secara praksis pada ranah formal relevan dengan poin

---

<sup>1</sup> Parmudi, *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Dalam perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam* (IAIN Semarang,2014), h. 115-135.

<sup>2</sup> Haikal Fadhil Anam, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia", *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, vol. 2,no. 2, Tahun 2019, h.181-188.

nomor satu yaitu pemilihan umum secara nasional dan pemilihan kepala daerah di seluruh daerah yang ada di Indonesia kecuali pada daerah istimewa.

Pada sistem ini kita bisa melihat bagaimana pemilihan presiden, legislative dan kepala daerah dengan prosedur secara langsung dilaksanakan. Karena pada negara demokrasi modern pemilihan umum dianggap sistem dan tolak ukur dari demokrasi itu.<sup>3</sup> Hasil dari pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilambangkan sebagai kemenangan rakyat karena salah satu basis material dari pemilihan umum adalah suara dari rakyat itu sendiri. Karena dengan adanya pemilihan umum ini rakyat bisa menentukan pemimpin yang akan memimpin berdasarkan hak pilih, hati nurani, kebutuhan dan harapan berupa keberpihakan dan keadilan terhadap rakyat itu sendiri. Calon pemimpin yang berkontestasi dalam demokrasi secara formal; harus mendapatkan suara terbanyak agar bisa mendapatkan kursi atau bisa menjadi pemenang dalam kontestasi yang ada. Jadi syaratnya harus berharap pada partisipasi politik yang aktif dari rakyat. Maka sangat berhubungan erat antara partisipasi politik rakyat dengan penentuan posisi pejabat publik di Indonesia yang terwujud secara formal seperti pemilu dan pilkada.

Dalam wilayah partisipasi rakyat, pemilih millennial adalah bagian dari rakyat yang akan menentukan kesuksesan pemilu dan pilkada. Pemilih millennial adalah pemilih yang lahir pada era 90-an yang mempunyai karakter energik, inovatif, kreatif, maju dan modern. dan sekarang mampu memberikan kontribusi besar dalam politik di Indonesia,<sup>4</sup> Hal itu yang membuat mereka menjadi lirikan terpenting dari kandidat calon yang bertarung pada pemilu atau pilkada. Menggali preferensi dari pemilih millennial sangat penting dalam tulisan ini, karena preferensi politik menjadi dorongan bagi pemilih millennial untuk menentukan siapa atau partai apa yang akan mereka pilih. Agama sering menjadi pertimbangan penting dalam preferensi politik bagi millennial. Hal ini akan terjadi karena Indonesia merupakan negara yang masih memperhitungkan agama dalam menentukan kebijakan politik yang ada dan dalam pemilu dan pilkada. Agama sering dijadikan simbol politik untuk menarik perhatian dari para pemilih, termasuk juga pemilih millennial.

Maka berdasarkan penjelasan di atas. Penelitian ini akan menggali mengenai relasi antara agama dan politik, dalam Pilkada di Sulawesi Utara tahun 2020. Relasi antara agama dan politik akan dilihat dari preferensi politik pemilih millennial yang ada di desa Ponosakan Belang. Bagaimana preferensi mereka untuk menentukan pilihan pada kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara. Penelitian ini menjadi penting karena sistem demokrasi lahir dari sekularisme yang ada di Barat akan tetapi ketika demokrasi di Indonesia, masih memakai agama untuk menentukan hajat hidup orang banyak. Tesis penulis adalah antara agama dan politik sangat sulit dipisahkan, apalagi dalam pilkada, agama menjadi pendorong dan pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan pilihan politik.

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 2008), h.461.

<sup>4</sup> Dewi Sagita dkk, "Perilaku Pemilih Milenial dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, FisiPublik* vol. 03, no. 02, Tahun 2018, h. 1-11.

## B. Pembahasan

### 1. Model Perilaku Politik

Bagian ini akan menjelaskan teori yang akan dipakai dalam melihat preferensi politik rakyat dalam memilih calon pemimpin. Preferensi pemilih dapat kita lihat berdasarkan dorongan atau perilaku politik seseorang. Pembacaan ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis pemilih, serta kait kelindannya dengan agama. Sebelum masuk lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan mengulas tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara langsung dalam kontestasi politik, atau tidak langsung dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public policy*). Perilaku politik ini bisa kita teropong sejauh mana keterlibatan orang dalam pemilihan umum atau pilkada. Apakah dia tergolong pada perilaku politik pasif atau aktif. Tentu ukurannya adalah hanya sebatas menjadi pemilih pada saat hari pemilihan ataukah secara aktif dengan melibatkan diri dalam pelbagai agenda kepemiluan mulai dari penyelenggara, pengawasan, pemantauan dan hingga menjadi pasangan calon atau partai.

Partisipasi politik sangat berpengaruh dan menjadi syarat yang dituntut dalam negara demokrasi. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Huntington dan Nelson yang menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dari pemerintah.<sup>5</sup> Dalam negara demokratis keterlibatan rakyat menjadi bagian yang sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan. Negara demokrasi membuat rakyat berdaulat dan kekuasaan ada ditangan rakyat. Karena dari kedaulatan rakyat, akan terwujud keputusan bersama. Dari penjelasan ini dapat kita tarik , bahwa partisipasi politik sangat erat dengan preferensi dan dorongan-dorongan politik dari rakyat untuk menentukan pilihannya. Partisipasi dan preferensi merupakan hak politik dari warga negara dan inilah yang ada pada negara demokrasi seperti Indonesia. Preferensi dari rakyat adalah bagian fundamen, karena hal ini yang akan menentukan partisipasinya pada hajatan demokrasi, maka untuk membaca preferensi ini, penulis memakai teori pendekatan model sosiologis dan model pendekatan psikologis

Model sosiologis adalah teori perilaku politik yang lahir dari *Columbia*. Model ini lahir dari universitas *Columbia* dan dipelopori oleh Lezarsfeld tahun 1940. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran kerja, lingkungan tinggal dan sebagainya.<sup>6</sup> Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa realitas sosiologis yang sama dengan individu atau kelompok sangat melekat dengan penentuan atau pilihan-pilihannya. Realitas sosiologis tersebut menjadi nilai-nilai sosiologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bartels yang membentuk nilai-nilai sosiologis tersebut

---

<sup>5</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1977), h. 3.

<sup>6</sup> RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, vol. 12, no. 1, Tahun 2015, h.117-135.

diantaranya adalah agama, kelas sosial, etnos daerah tradisi keluarga dan lain-lain.<sup>7</sup> Agama, struktur sosial dan pengaruh daerah meskipun dia mempunyai wilayah kajiannya sendiri akan tetapi pada model sosiologis ini, bagian-bagian tersebut dirangkul dalam pembacaan terhadap perilaku politik individu atau kelompok. Model ini mempunyai asumsi bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaan dan usianya, sehingga mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan pemilih disebabkan kontrol dan tekanan.<sup>8</sup> Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sosiologis memberi petunjuk atau memberi pendekatan untuk membaca pemilih yang konstan preferensinya dan alasan-alasan untuk memilih apa yang diyakininya.

Nilai-nilai sosiologis tersebut berjejaring dan memunculkan kesamaan dengan seseorang yang akan menentukan pilihannya. Memilih sebenarnya bukan hanya sekedar pengalaman pribadi atau kelompok tetapi Individu tersebut cenderung mengikuti posisi dan situasi yang menjadi pengalaman hidupnya. Dalam politik banyak faktor menunjukkan dalam indeks utama dalam pendekatan ini yakni: status sosial, ekonomi, agama dan daerah tempat tinggal. Menurut hasil yang diuji bahwa faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat relijiusitas; ras, etnik, atau sistem kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis dianggap banyak mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.<sup>9</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model sosiologi agama menjadi salah satu preferensi penting untuk mendorong pemilih dalam pemimpin pada aras nasional maupun daerah.

Pembacaan mengenai preferensi politik pemilih berikut adalah pendekatan psikologis dari mazhab Michigan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh para pakar ilmu politik dari universitas Michigan. Pendekatan ini bisa kita lihat pada buku *American Voter*<sup>10</sup>. Berbeda dengan model sebelumnya, model psikologis adanya menjelaskan bahwa keterikatan/dorongan antara psikologis membentuk orientasi politik seseorang.<sup>11</sup> Pilihan individu terhadap kandidat pemimpin sesuai dengan beberapa isu yang diangkat dan salin kait kelindan hingga publik tertarik dengan isu-isu tersebut. Dalam penjelasan ini, ada tiga bentuk pokok yang menjadi pusat perhatian pada teori ini, yaitu: (1) Persepsi dan penilaian pribadi

<sup>7</sup> Bartels, L.M , *The Study of Electoral Behavior*: In Handbook Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of America Elections and Political Behavior*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), h. 240.

<sup>8</sup> Roth D, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: FriderichNaumaannStiftung fur die Freiheit, 2008), h. 115.

<sup>9</sup> Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 6-21.

<sup>10</sup> Campbell, A, P.E Converse, W.E Miller, & D.E Stokes, *The American Voter* (New York: Willey, 1960), h. 65.

<sup>11</sup> Haryanto, "Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosila dan Ilmu Politik JSP*, vol. 7, no. 3, Tahun 2014, h. 291-308.

terhadap kandidat; kualitas pribadi kandidat baik secara moralitas maupun kualitasnya menjadi pertimbangan yang sangat urgen bagi calon pemilih. (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; selain penilaian pada pribadi sang kandidat bagi para pemilih isu yang dikembangkan juga menjadi bagian dari pertimbangan, isu-isu yang dinarasikan oleh para kandidat menjadi emacam penyulut bagi pemilih untuk memilih kandidat tersebut. isu-isu yang dikembangkan diantaranya adalah isu agama, ideology, kepentingan yang sama dan kesejahteraan para pemilih dan (3) identifikasi partai atau *partionship*. Identitas partai juga menjadi bahan pertimbangan selain dari kualitas pribadi dan isu yang dimainkan. Identifikasi partai terhadap kandidat merupakan bagian yang sangat besar juga, mengingat pada politik electoral partai menjadi instrument politik.

Keyakinan diatas inilah yang paling dekat pada keputusan suara dan karena. Hal ini memiliki dampak langsung dan sangat kuat terhadap perilaku pemilih.<sup>12</sup> Pendekatan psikologis pada prinsipnya lahir untuk mengkritik teori sosiologi, bagi teori ini bukan pendekatan sosiologi yang berpengaruh langsung pada sikap pemilih akan tetapi faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mendekati pemilih pada pemilihannya orientasi isu merupakan sebuah kerangka kerja secara jangka pendek dipakai dalam tepri ini. Isu yang relevan akan mendekati kandidat dengan putusan pemilihan. Yang terpenting isu tersebut berhubungan erat dengan tiga persyaratan; 1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun sistemt.<sup>13</sup> Isu-isu tersebut bisa isu apapun mengenai kehidupan sosial maupun keagamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas kedua teori tersebut tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi bisa diintegrasikan untuk membaca preferensi politik pemilih yang akan menentukan pilihannya dalam pemilu maupun pilkada. Dua pendekatan tersebut akan dipakai dalam membaca peristiwa demokrasi formal di pilkada yang ada di Sulawesi Utara, khususnya para pemilih millennial di Desa Ponosakan Belang. Bagian-bagian yang menjadi asumsi dasar teori tersebut ada yang tidak bisa dipakai untuk menganalisa fakta yang terjadi. bukan untuk menegaskan karena ketika bagian semuanya dipakai maka akan membuat kekeliruan dalam membaca fakta dan data yang ada.

## **2. Membaca Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Sulawesi Utara**

Sebagai negara demokrasi Indonesia, setiap lima tahunan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah. (Pilkada). Pemilu dan Pilkada daerah di Indonesia merupakan perwujudan dari berdaulatnya rakyat. Kedaulatan rakyat untuk memilih jabatan-jabatan dalam eksekutif maupun legislative dan kedaulatan rakyat juga sebagai syarat, bagi tumbuhnya negara

<sup>12</sup> Dalton, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*, (New York: Chatham House Publishers, 2002),h. 173.

<sup>13</sup> Roth D, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: FriderichNaumaannStiftung fur dieFreiheit, 2008), h. 40.

demokrasi. Pemilu dan pilkada dilindungi oleh aturan, selain sebagai aspek legal formal dalam kenegaraan, cara ini juga menunjukkan bahwa Indonesia negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada adalah Undang-undang Dasar 1945, dengan Undang-undang (UU) no 22 E 1945 mengenai pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara Gubernur dan wakil Gubernur; Bupati dan wakil Bupati; dan Walikota dan Wakil Walikota. Serta turunan dalam pemilu diatur dalam UU no 7 tahun 2017 dan UU no 10 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan Pilkada. Dalam pemilu dan Pilkada terdapat empat hal penting yaitu: aturan seperti penjelasan yang di atas; Pemilih yang merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar pada pemilu dan pilkada; Penyelenggara pemilihan umum terdapat tiga lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2020 ini akan melaksana pemilihan Gubernur 2021-2026. Bukan hanya sulut pilkada pada periode ini di Indonesia akan dilaksanakan secara serentak sesuai dengan putusan penyelenggara akan dilaksanakan pada 9 Juni 2020, namun karena Indonesia dilanda pandemic covid 19 yang banyak mempengaruhi kehidupan publik termasuk aspek politik membuat Pilkada serentak ditunda pada 9 Desember 2020. Berdasarkan putusan pleno pada tanggal 23 september 2020 KPU Sulawesi Utara menetapkan 3 paslon untuk bertarung pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2020.<sup>14</sup> Ketiga calon itu diantaranya adalah pasangan Olly Dondokambey - Steven Kandouw (PDI-P, PSI, PKB, PPP, Partai Perindo dan Partai Gerindar, pasangan Cristiany E Paruntu - Sehan Salim Landjar diusung oleh (Partai Golkar, PAN dan Demokrat) dan Vonny Anneke Panambunan-Hendry (Partai Nasdem dan PKS). Ketiga calon itu akan bertarung pada demokrasi electoral yang berada di Sulawesi Utara. Sesuai dengan syarat dari aturan kepemiluan mereka memakai partai sebagai kendaraan politik. Partai-partai yang dikendarai sudah masuk pada syarat kursi yang ada diranah legislatif. Artinya secara nasional maupun kedaerahan dalam kehidupan demokratis eksekutif dan legislatif tidak bisa ada garis demarkasi.

Kemudian Sulawesi Utara menggelar pengundian nomor urut peserta dari pasangan calon. berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 139/PL.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.<sup>15</sup> Aturan yang dikeluarkan oleh KPU Sulawesi Utara tersebut menjadi acuan pada penetapan nomor urut calon

<sup>14</sup> <https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut-tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020>, diakses pada 25 Desember 2020.

<sup>15</sup> <https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pengundian-dan-pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-peserta-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur--sulawesi-utara-tahun-2020.html#https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut-tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020>, diakses pada 25 Desember 2020.

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon dilakukan dengan cara pengundian. Karena Indonesia masih dalam kondisi pandemic Covid 19 maka untuk memutus mata rantai penularan penetapan Calon tersebut dilakukan secara live streaming.

Berdasarkan pengundian yang dilakukan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendapatkan nomor urut sebagai berikut; nomor urut 1 pasangan Cristiani Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL); Nomor urut 2 Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR). Terakhir, pada nomor urut 3 didapatkan oleh pasangan calon Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK). Maka dengan mengantongi nomor urut yang ada dan Meski berada di tengah pandemic covid -19 Pilkada 2020 akan tetap dilanjutkan. Pilkada 2020 di Sulawesi Utara diikuti juga pasangan calon petahana, yang merupakan gubernur dan wakil gubernur periode 2015-2020, pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut tiga atas nama OD-SK. Para kandidat dalam Pilkada 2020 yang telah mendapatkan nomor urutnya di Provinsi Sulawesi Utara ini akan maju proses selanjutnya yaitu masa kampanye, debat publik sampai pada masa pungut hitung.

### 3. Potret Pemilih Millennial di Ponosakan Belang

Mengacu pada pengertian umum demokrasi merupakan semangat mempunyai nilai-nilai kebebasan, kesamaan dan keterbukaan. Demokrasi dalam penerepannya membutuhkan kesepakatan politik oleh mayoritas rakyat demi menjalankan tatanan negara. Jadi dalam hal ini demokrasi mengandung tiga fenomena politik (kekuasaan), fenomena etika (ajaran moral), dan fenomena hukum yang saling membentuk. Teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas menolak tatanan kekuasaan politik yang otoriter dan totaliter.<sup>16</sup> Seiring perkembangannya dalam sistem politik kenegaraan demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik dan hampir seluruh negara di dunia memakai sistem ini. Demokrasi banyak dipakai karenan semangat persamaan dan keterbukaan yang berlawanan dengan otoritarian dan totalitarian.

Suara mayoritas dan kedaulatan rakyat merupakan ciri dari tatanan demokrasi secara formal. Dalam hal ini adalah *votting* (Pemilihan) yang diwujudkan dalam kegiatan pemilu (pemilihan umum). Oleh karenanya, partisipasi politik dalam pemilu atau pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi.<sup>17</sup> Suara rakyat merupakan syarat mutlak bagi jalannya demokrasi. Suara rakyat ini menjadi nasib penentu suatu bangsa maupun daerah ke depan. Di Ponosakan Belang pemilih millennial menyambut Pilkada 2020 dengan sangat antusias. Bukan hanya menjadi pemilih pasif, tetapi menjadi pemilih aktif dengan melibatkan diri sebagai tim sukses pasangan calon dan terlibat pada lembaga penyelenggara dan pengawasan tingkat desa.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Hendra Nurtjahjo *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 83.

<sup>17</sup> Hairul Rizal, "Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Rakyat Di Kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014", *INRIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 5, no. 2, Tahun 2017, h. 331-348.

<sup>18</sup> Sahrial Tani (Masyarakat), *Wawancara*, 15 Desember 2020.



Ponosakan Belang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Di Kecamatan Belang pemeluk agama Islam lebih banyak dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Dalam lingkup kabupaten, penduduk yang beragama Islam hanya 17 %, sementara pemeluk agama Protestan 81%.<sup>19</sup> Jadi muslim Kecamatan Belang, khususnya desa Ponosakan Belang berada di tengah-tengah mayoritas pemeluk agama protestan. Menariknya adalah dalam Pilgub, perbedaan agama dan persentase pemeluk agama antara yang mayoritas dan minoritas sering menjadi permainan politik untuk mendapatkan tempat bagi pemilih dalam hal ini pemilih millennial muslim di Ponosakan Belang. Narasi mayoritas dan minoritas menjadi produk politik untuk menarik perhatian pemilih millennial muslim di Ponosakan Belang. Karena dalam Pilkada membutuhkan sebanyak-banyak suara dari pemilih yang ada, maka isu keagamaan menjadi sangat krusial untuk dimainkan. Terlebih kalau melihat dalam Pilgub 2020 ini terdapat pasangan calon yang beragama Islam. Kandidat pasangan calon yang beragama Islam adalah Cristiany Eugene Paruntu-Sehan Salim Lanjar (CEP-SSL). Pasangan calon ini berada pada nomor urut 1 pada pemilihan gubernur 2020 Sulawesi Utara. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Sehan Salim Landjar atau dikenal dengan panggilan eyang adalah kandidat yang beragama Islam. Dalam pilkada Sulawesi Utara 2020 hubungan agama dan negara sangat penting dikaji. Karena kemenangan pilkada tergantung pada berapa banyak yang memilih, maka agama menjadi penting bagi kandidat untuk masuk dalam wilayah kampanye atau pencitraannya demi mendapatkan perhatian publik.

Mayoritas pemilih millennial di Ponosakan Belang memiliki identitas sebagai muslim, mereka menaruh harapan secara keagamaan pada kandidat calon gubernur yang mempunyai identitas yang samayaitu pasangan CEP-SSL. Kelompok ini bahkan tidak tertarik kepada gubernurnya Cristiany Eugene Paruntu, akan tetapi mereka tertarik Sehan Salim Landjar (SSL). Alasan inilah menjadi preferensi bagi mereka untuk mempertimbangkan preferensi politik pada pilkada Sulut tahun 2020, di desa Ponosakan Belang.

Dalam kehidupan sehari-hari agama masih menjadi faktor terbesar dalam memutuskan sesuatu, ia menjadi dasar moral bagi rakyat dalam bertingkah laku secara individu maupun secara bersama. Begitupula dalam politik ada relasi yang melekat dan sulit untuk dipisahkan. Indonesia sebagai negara dunia ketiga agama memainkan peran penting dalam hajat hidup orang banyak. Dalam kaitannya dengan politik formal agama menjadi dorongan bagi pemilih millennial dalam menentukan pilihannya dalam kontetasti pemilu atau pilkada. Ada beberapa ulasan yang bisa saya petakan sesuai dengan teori yang dipakai dalam menggali preferensi politik dari pemilih millennial di Ponosakan. Untuk itu dalam penelitian ini saya menemukan bahwa ada dua preferensi politik terdapat pada pemilih millennial di Ponosakan Belang yakni: Identitas agama yang sama dan *Ukhuwah Islamiyah*.

---

<sup>19</sup> <https://sulut.bps.go.id/indicator/108/732/1/persentase-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>, diakses pada Minggu 28 Februari 2021.

### a. Identitas Agama yang Sama

Adanya nilai-nilai yang sama menjadi bagian dari preferensi bagi pemilih untuk mempertimbangkan kandidat yang akan dipilih. Identitas adalah bagian yang sangat penting pada kehidupan sosial. Lewat identifikasi antara individu dengan individu yang lain di tengah rakyat membuat munculnya rasa yang sama, identitas yang muncul itu diantaranya adalah suku, budaya, tempat tinggal, gender dan agama. Dalam kontetasi politik, agama merupakan identitas yang sangat penting. Rakyat Indonesia menunjukkan hal itu baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pemilih millennial di Ponosakan Belang menunjukkan hal yang sama bahwa agama menjadi pertimbangan pada penentuan sikap politiknya pada pemilihan gubernur 2020. Bagi para pemilih di ponoskan Belang SSL di pilih karena satu aqidah dengan mayoritas rakyat muslim yang ada di Ponosakan Belang dan dia sebagai perwakilan dari agama Islam dalam Pilkada 2020.<sup>20</sup>

Identitas agama menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan pilihan politik, inilah yang terjadi di Ponosakan Belang. Realitas di atas menunjukkan identitas menjadi kacamata politik bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, padahal sistem demokrasi tidak mengafirmasi identitas akan tetapi semua rakyat sama dan egaliter dalam sistem yang ada. Namun karena adanya identifikasi persamaan, demokrasi menjadi particular, karena politik identitas. Agama menjadi pendorong dan bagian penting bagi millennial Ponosakan Belang. Dalam keadaan apapun agama tidak bisa dipisahkan dalam wajah publik, apalagi dalam Pilkada, intinya agama menjadi penentu dalam pemilihan gubernur.<sup>21</sup> SSL merupakan pendorong dari para pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 1, bukan karena partainya ataupun karena preferensi politik murni karena dorongan politik demokratis. Tetapi karena agamanya menjadi pertimbangan penting dan sangat di Ponosakan Belang.<sup>22</sup> Sangat sulit ketika mereka tidak menjatuhkan pilihan pada SSL, karena agama sudah tertanam dan menjadi ideologi. Maka pilkada bagi para pemilih diandaikan seperti pertandingan antar agama untuk merebut kekuasaan.

SSL menjadi sebuah harapan bagi pemilih millennial, tentunya harapan yang punya kait kelindan dengan agama. SSL banyak disukai karena aqidah.<sup>23</sup> SSL dipandang sebagai persentasi muslim dalam Preferensi agama menjadi jejaring politik secara sosiologis. Ia menjadi pengikat secara sosial. Agama SSL menjadi identitas pengikat antara dia sebagai kandidat dan millennial sebagai peserta pilkada di Ponosakan Belang. Karena identitas agama yang sama merupakan bagian besar penentu dari pemuda di Ponosakan Belang untuk memilih kandidat. Selain itu juga bagi mereka ada nilai-nilai dan sebuah realitas yang sama secara sosial yang dihadapi, yaitu; selama ini sulit untuk menghadirkan pemimpin Islam yang memimpin Sulut. SSL menjadi harapan dalam cita-cita untuk menghadirkan pemimpin Islam. Melihat realitas di atas, relasi antara agama dan politik sulit dilepaskan, dia menjadi pelekata

<sup>20</sup> Arya Duta Andaria (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>21</sup> Sahrial Tani, (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>22</sup> Muhammad Rizky Daeng (Pemilih), *Wawancara*, 16 Desember 2020.

<sup>23</sup> NurArifah Uno (Pemilih), *Wawancara*, 16 Desember 2020.

kepentingan bersama. Meskipun motif politik kandidat muslim tidak diketahui, tetapi ketika tampil dengan simbol agama, dia akan diperhitungkan untuk dipilih. Agama bukan hanya soal ritual semata, pada aspek politik ia sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan.

#### **b. Ukhuwah Islamiyah**

Dalam realitas sosial *Ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama Islam sangat memiliki pengaruh, apalagi kalau berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, misalnya menjadi minoritas ataupun mengalami ketidakadilan. Dalam wilayah politik *Ukhuwah Islamiyah* menjadi tali pengikat antar sesama muslim. Dalam politik *Ukhuwah Islamiyah* menjadi salah satu bentuk kunci bagaimana hubungan antara Islam dan negara atau secara konseptual antara Islam dan politik menjadi terikat. Dengan adanya kandidat dari Islam, ia dijadikan platform persaudaraan dalam Islam. Yang paling dekat dengan kita adalah agama kita sendiri. Di Ponosakan Belang, *Ukhuwah Islamiyah* menjadi titik temu untuk memilih SSL. Antara sesama agama tidak bisa saling meninggalkan. Eyang tidak bisa ditinggalkan muslim harus memilih dia.<sup>24</sup> Antara satu muslim dengan muslim yang lain bersaudara mengapa tidak mendukung pada sesama muslim.<sup>25</sup> Hal ini menjadi kepercayaan pada kandidat muslim, kepercayaan karena agamanya bukan karena prestasi atau visi politiknya.

Simbol dan narasi-narasi Islam salah satu aspek penting untuk memunculkan perasaan *Ukhuwah Islamiyah* antara sesama pemeluk Islam. Dalam model teori psikologi politik simbol dan narasi sebagai isu. Isu ini menjadi pendorong yang sangat besar untuk membentuk preferensi maupun perilaku politik para pemilih. Karena agama menjadi preferensi dalam memilih isu menjadi pendorong dan pendukung untuk menjatuhkan pilihannya. Dan narasi ini sering dimainkan oleh tim dari calon nomor satu. Narasi yang sering dimainkan dalam pilkada 2020 di Ponosakan Belang adalah “kopianh pilih kopianh”, dan simbol ini menjadi salah satu bagian penentu, alasan kenapa pemilih millennial memilih SSL.<sup>26</sup> Narasi politik tidak meski sangat kecil, jikalau diproduksi secara terus menerus dia akan menjadi kekuatan politik.

Kopianh adalah peci yang melambangkan simbol-simbol Islam. Meskipun secara nasional peci hitam adalah sebuah identitas publik bagi pejabat di Indonesia. Tetapi pada pemilihan Gubernur 2020 di Sulawesi Utara kopianh melambangkan perwakilan dari umat Islam atas dasar ini *Ukhuwah Islamiyah* terbangun. Selain itu ada juga dorongan yang nyang lain dan dalam kampanye, ini yang terus disuarakan seperti Islam Agamaku, Ka’bah Kiblatku dan Eyang adalah Pilihanku. Eyang menjadi perwakilan dari muslim, memilih dia adalah kiblat politik dari umat Islam.<sup>27</sup> Dari narasi tersebut sangat kental nuansa keagamaan. Bahwa kalau memilih eyang berarti sudah sesuai dengan agama kita dan mengikuti apa yang menjadi kiblat dari pemerintah agama. Preferensi politik

<sup>24</sup> Adit Dwi Kurniawan Hala (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>25</sup> Azrul Makarateng (Pemilih), *Wawancara*, 16 Desember 2020.

<sup>26</sup> Arya Duta Andaria (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>27</sup> Arya Duta Andaria (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

ini membuat sikap umat Islam dalam politik menjadi tertutup dalam arti bahwa hanya terfokus pada *Ukhuwah Islamiyah* saja, sementara yang lain dianggap bukan sebagai saudara dalam kehidupan politik.

Tidak cukup sampai disitu relasi Islam dan negara menjadi harapan yang panjang dalam *ukhuwah Islamiyah*. Harapan secara keagamaan ini biasa dimunculkan dalam kampanye dan menjadi tawaran politik kandidat dan masa pendukung. Pemilih millennial ponosakan Belang mengharapkan bahwa pejabat publik harus mendominasi dari muslim karena kalau golongan lain akan menjadi sulit bagi muslim untuk mendapatkan akses politik.<sup>28,29</sup> Preferensi politik di atas juga semakin terlihat bahwa kentalnya politik identitas pada Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Utara khususnya di desa Ponosakan Belang. Karena relasi agama dan politik sulit dipisahkan dan sistem keagamaan selalu di jadikan sebagai narasi politik. Politik identitas sangat kental dari para pemilih Millennial Ponosakan Belang ini, karena bagi mereka agama masih menjadi pertimbangan kuat untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Selain isu yang mempengaruhi, mereka dibayangi dengan harapan keagamaan, bahwa kalau bukan dari Islam yang menjabat maka akan sulit umat muslim untuk mendapatkan akses publik.

*Ukhuwah Islamiyah* dipandang sebagai landasan berpolitik. Persaudaraan dianggap sebagai sentral, dan tentu tepat sekali jika diyakini sebagai obat yang paling mujarab dalam menjawab tantangan Islam.<sup>30</sup> Melihat pemilih millennial yang ada di Ponosakan Belang menunjukkan fenomena yang partikular dalam negara demokrasi. Memang agama pada dunia modern sulit dipisahkan, akan tetapi ada wilayah-wilayah tertentu untuk memakai agama, sejalan apa yang dikatakan oleh Esposito dan Voll bahwa dalam pranata modern isu terpenting menyangkut kebangkitan agama dan perkembangan politik adalah sumber-sumber demokrasi yang potensial dalam tradisi Islam serta kemampuan gerakan-gerakan Islam baru untuk bekerja secara efektif guna tuntutan kemurnian Islam dan partisipasi secara demokratis.<sup>31</sup> Agama menjadi bagian penting dalam demokrasi modern apalagi di Indonesia, ia tidak bisa dipisahkan dengan politik. di Ponosakan Belang adalah para pemilih millennial mereka masih beranggapan bahwa dalam memilih pemimpin daerah harus mengikuti perintah Islam bahwa mereka sedang memilih Khalifa. Khalifah yang dipilih sesuai dengan perintah dari Allah dan rasul. Akan tetapi mereka tidak menggali dan membedakan apakah ini benar-benar anjuran dari Islam. Padahal merujuk pada kategori millennial yang energik, kreatif maupun maju. Simbol-simbol atau identitas menjadi bagian belakang untuk menentukan sikap politik. Dengan kemampuan yang kreatif di tengah aras demokrasi yang terpenting adalah integritas, visi dan

<sup>28</sup> Adit Dwi Kurniawan Hala (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>29</sup> Arya Duta Andaria (Pemilih), *Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>30</sup> Idzam Fautanu, dkk, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid", *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, vol.2, no.2, Tahun 2020, h. 87-112.

<sup>31</sup> John S. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek*, (Bandung; Mizan, 1999), h. 6.

program sosial politik adalah preferensi yang sangat penting dan harus diutamakan.

### C. Kesimpulan

Demokrasi formal amenjadi wadah pertemuan antara agama dan negara. Relasi antara agama dan politik sulit untuk dipisahkan bukan hanya pada perumusan kebijakan di Indonesia, untuk menentukan pemimpin pun seperti itu dan bahkan datang dari rakyat Indonesia itu sendiri. Dua bagian ini terus hidup dalam alam demokrasi di Indonesia. Agama dalam kehidupan kenegaraan masih diperhitungkan dalam mempertimbangkan sesuatu. Argumen ini dibangun berdasarkan apa yang terjadi dalam pemilihan gubernur di Ponorogo, Belang, Agama dipakai sebagai kacamata politik untuk menentukan pilihannya begitu pula dengan kandidat calon gubernur, agama dijadikan isu dalam ruang publik demokrasi agar meraup suara bagi para pemilih. Faktor agama yang membentuk identitas dan nilai-nilai yang sama membuat agama dan negara sulit dipisahkan. Keterkaitan identitas yang sama antara kandidat dan pemilih millennial menjadi bagian terpenting dalam ajang demokrasi di Sulawesi Utara.

Rasa persaudaraan antara sesama muslim atau *Ukhuwah Islamiyah* adalah bagian selanjutnya yang menunjukkan hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Dalam kontestasi pilkada pemilih mengandaikan bahwa yang bertarung ini antar agama, bukan antar pemimpin. *Ukhuwah Islamiyah* menunjukkan keterpisahan antara umat Islam dengan yang pemeluk agama yang lain. Demokrasi yang merupakan sistem yang lahir dari barat yang sekuler. Tetapi dalam konteks di Indonesia, demokrasi bertaut dengan agama. Dua hal ini sangat sulit dipisahkan dia akan terus membangun relasi, karena di Indonesia meskipun menerapkan sistem demokrasi. Agama masih menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan hajat hidup orang banyak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bartels, L.M , *The Study of Electoral Behavior: In Handbook* Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of America Elections and Political Behaviior*, Oxford:Oxford University Press, 2012.
- Campbell, A, P.E Converse, W.E Miller, dan D.E Stokes, *The American Voter New york: Willey*, 1960.
- Dalton, Dalton, R. J. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York: Chatham House Publishers, 2002.
- Dewi Sagita dkk, "Perilaku Pemilih Milenial dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Fisi Publik*, vol. 03, no. 02, Tahun 2018.
- Hairul Rizal, "Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Rakyat Di Kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres", *Jurnal Agama dan Hak Azazi , INRIGHT Manusia*, vol. 5, no. 2, Tahun 2014.

Haikal Fadhil Anam, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, vol. 2 no. 2, Tahun 2019.

Haryanto, "Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosila dan Ilmu Politik JSP*, vol. 17, no. 3, Tahun 2014.

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

<https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut-tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020>,

<https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pengundian-dan-pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-peserta-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur--sulawesi-utara-tahun-2020.html#>

<https://manado.kompas.com/read/2020/09/23/22323421/kpu-sulut-tetapkan-3-paslon-bertarung-di-pilkada-2020>,

<https://sulut.bps.go.id/indicator/108/732/1/persentase-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>,

Idzam Fautanu, dkk, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid", *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* vol. 2, no.2, Tahun 2020.

Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, vol. 12, no 1, Tahun 2015.

Roth D. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, Jakarta: Friderich Naumaann Stiftung fur die Freiheit, 2008.

Parmudi, *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Dalam perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam*, IAINSemarang, Tahun 2014.

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Mizan Publika, 2012

Adit Kurniawan Hala (Pemilih), Wawancara, 15 Desember 2020.

Arya Duta Andaria (Pemilih), Wawancara, 15 Desember 2020.

Azrul Makarateng (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020.

Muh. Rizky Daeng (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020.

Nur Arifah Uno (Pemilih), Wawancara, 16 Desember 2020

Sahrial Tani (Pemilih), Wawancara 15 Desember 2020